

Policy Brief

Studi Kekerasan Berbasis Gender pada Remaja Populasi Kunci



Forum
Populasi
Kunci
usia Muda



Tindakan kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh instrumen-instrumen dan konvensi-konvensi internasional. Banyak aksi kekerasan berbasis gender dapat digolongkan sebagai aksi melanggar hukum dan kriminal dalam kebijakan dan undang-undang nasional. Kekerasan berbasis gender di seluruh dunia paling banyak menimpa perempuan dan remaja perempuan, serta remaja populasi kunci lain yang di marginalkan.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW ke dalam UU No.7 tahun 1984, UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tetapi kebijakan pemerintah yang ada terkait kekerasan saat ini lebih menysar kepada perlindungan perempuan dan anak, sementara itu tidak bagi remaja. Apabila melihat pada realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sendiri ditemukan bahwa kasus kekerasan juga dialami oleh populasi kunci, seperti Gay, Waria Pekerja Seks perempuan dan pengguna napza terlebih kepada mereka yang masih remaja. Kasus kekerasan yang dialami oleh remaja Waria dan Gay contohnya yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya persoalan identitas gender dan orientasi seksual yang masih dipandang buruk oleh lingkungan disekitarnya. Kasus kekerasan yang dialami oleh mereka sering kali berujung pada ketidak jelasan penanganan hukum dan peradilan.

Gambaran Situasi Akses Informasi, Layanan Kesehatan dan Layanan Bantuan Hukum

Remaja populasi kunci yang karena identitas yang dimilikinya sering kali mendapatkan stigma dan diskriminasi ketika mengakses Layanan baik kesehatan maupun hukum dalam pemenuhan hak mereka. Beberapa responden yang pernah mengakses layanan kesehatan mengutarakan bahwa mereka lebih sering memanfaatkan layanan kesehatan yang dirujuk oleh komunitas atau lsm yang sering menjangkau mereka. Layanan kesehatan ini termasuk mobile clinic kolaborasi lsm dan penyedia layanan kesehatan

Pada waria remaja, beberapa diantara mereka mengatakan bahwa mereka dapat melakukan konseling ketika mendapatkan kekerasan. Institusi yang menyediakan layanan ini adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Situasi berbeda tergambar oleh responden dari remaja populasi kunci lain ketika mencoba untuk mengakses layanan hukum negara seperti kepolisian ketika mereka mendapatkan kekerasan. Hanya segelintir kecil dari responden yang dapat menyatakan sikap untuk dapat melakukan pengaduan ke bantuan hukum negara ketika mendapatkan kekerasan. Hal ini disebabkan karena banyak hal, seperti keengganan untuk dapat membuka identitas mereka karena takut mendapatkan stigma, sikap penyediaan layanan hukum, dan proses serta ketersediaan barang bukti.

Hambatan dan Tantangan Dalam Perspektif Populasi Kunci

Dalam hal akses Informasi, sejak dulu remaja tidak mendapatkan informasi seksualitas komprehensif dengan tepat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang sudah turun menurun untuk menjadikan informasi semacam ini adalah hal yang tabu. Keluarga yang idealnya menjadi pintu gerbang utama untuk mentransfer informasi seksualitas secara tepat, malah menutup pintu informasi tersebut dengan alasan kebiasaan dan budaya. Faktor selanjutnya yang juga menghambat informasi kepada remaja adalah pada lembaga pendidikan bernama sekolah. Informasi seksualitas yang diberikan hanya sebatas pelajaran biologi yang tidak mengupas secara dalam, tentang apa itu seksualitas dan kaitannya dengan kesehatan dan upaya untuk remaja dapat melindungi dirinya baik dari penyakit dan kekerasan.

Hambatan lainnya yang didapatkan oleh remaja adalah setelah mereka mendapatkan kekerasan. Sedikit sekali informasi terkait dengan layanan kesehatan ataupun hukum yang didapat oleh mereka. Bukan karena informasinya tidak ada, namun karena lagi lagi informasi ini terbatas saat harus disampaikan kepada remaja. Remaja dianggap tidak penting untuk mengetahui informasi tersebut. Sehingga remaja menjadi enggan untuk mengakses layanan karena kita merasa tidak nyaman dan tidak leluasa. Bahkan remaja menjadi tidak mau mengakses layanan karena diabaikan karena orientasi seksualnya. Juga akses layanan jarum suntik yang sedikit diakses oleh teman-teman remaja dan perempuan, karena pihak penyedia layanan terbiasa untuk memberikan pelayanan yang diskriminatif.

Hal ini juga ditunjang dengan sedikitnya pemahaman masyarakat terhadap HAM dan hukum terkait dengan orientasi seksual. Yang semakin menguatkan stigma dan diskriminasi kepada remaja populasi kunci, seperti pada Gay, waria, pecandu, dan remaja yang hidup dengan HIV.

Sulitnya bantuan hukum yang didapat oleh remaja karena, karena bantuan hukum dari kepolisian tidak pernah berpihak kepada remaja pun menjadi. Sulit juga untuk remaja yang mendapat kekerasan untuk mencari barang bukti dan saksi menjadi kendala dalam membuat pelaporan. Tidak adanya informasi mengenai arahan yang jelas, tentang bagaimana membuat laporan kepada pihak kepolisian. Tidak adanya kebijakan dan undang undang yang dapat melindungi remaja saat mendapatkan kekerasan.

Harapan dalam Perspektif Responden

Dalam pandangan remaja, harapan mereka terkait penanganan kekerasan berbasis gender. Remaja berharap akses informasi yang mereka dapat lebih mudah. Baik informasi mengenai akses layanan kesehatan, akses kepada hukum dan informasi lainnya yang dapat menjadi bekal mereka. Seperti contohnya Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut dengan P2TP2A sebaiknya lebih bersahabat tidak hanya untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saja, tapi juga bisa menjadi tempat yang ramah untuk remaja korban kekerasan lainnya.

Diperlukan juga adanya tempat dan pengaduan khusus bagi komunitas. Terutama untuk kekerasan yang berbasis orientasi seksual. Adanya ruang untuk mempromosikan layanan terkait kekerasan terhadap remaja. Agar remaja memiliki ruang aman untuk mengakses.

Untuk Akses hukum, Kepolisian diharapkan bisa lebih bersahabat dengan remaja khususnya remaja populasi kunci. Penguatan kapasitas remaja akan HAM dan hukum juga diperlukan untuk memberikan mereka kesadaran akan kekerasan yang dialami.

Dalam organisasi atau komunitas, diharapkan pelibatan remaja populasi kunci harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, sehingga mereka bisa memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan yang sedang dibicarakan sesuai dengan perspektifnya sebagai remaja.

Pemerintah juga harus membuka mata dan realistis terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat bahwa remaja populasi kunci ini memiliki masalah yang khas dan membutuhkan arahan bukanlah kecaman. negara diharapkan memiliki political-will untuk melindungi remaja populasi kunci, seperti ODHA, pekerja seks, pecandu, LGBT dan perempuan.



Rekomendasi

Dari kesemua temuan yang kami dapatkan, kami merekomendasikan untuk :

1. Tersedianya layanan kesehatan, bantuan hukum, serta layanan post-trauma healing yang dapat diakses serta bersahabat bagi remaja dan remaja populasi kunci pada khususnya.
 2. Dilibatkannya remaja populasi kunci pada pengembangan rancangan strategi dan program yang diinisiasi oleh pemerintah. Keterlibatan juga di dorong untuk dapat melibatkan mereka dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi strategi tersebut. Stakeholder terkait harus dapat memastikan kepemimpinan remaja populasi kunci pada strategi atau program yang akan berdampak pada hidupnya
 3. Menyediakan data dan study terkait kekerasan berbasis gender pada remaja populasi kunci dalam keterkaitannya dengan kerentanan HIV dan aspek social lainnya. Study Kuantitatif sangat diperlukan untuk membuat informasi lebih strategis
 4. Pemerintah harus mengevaluasi strategi layanan kesehatan yang ditujukan untuk remaja , untuk dapat memastikan akses universal bagi semua remaja, termasuk remaja populasi kunci
- 